

KADERISASI KEPEMIMPINAN *PAMBAKAL* (KEPALA DESA) DI DESA HAMALAU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Farid Nofiard
D2B110042

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses kaderisasi yang dijalankan oleh *pambakal* (Kepala Desa) di Desa Hamalau untuk mempersiapkan kader penggantinya agar dapat melanjutkan kepemimpinannya sebagai Kepala Desa sehingga kelangsungan organisasi yang dipimpinnya akan terus berlanjut. Dalam hal ini peneliti mencoba untuk mengkaitkan dengan teori tentang proses kaderisasi yang di kemukakan oleh Stradling dengan penelitian yang menggunakan metode kualitatif untuk menggali atau mengungkap proses kaderisasi *pambakal* (Kepala Desa) di Desa Hamalau.

Berdasarkan hasil penelitian ini menggambarkan bahwa dalam proses kaderisasi oleh seorang pemimpin terdapat proses pemberian pendidikan politik kepada kadernya. Proses pendidikan politik yang dimaksud meliputi beberapa hal yaitu *Pertama*, pengetahuan yang terdiri dari pengalaman profesional dan pengetahuan praktikal. *Kedua*, keterampilan yang terdiri dari keterampilan intelektual, keterampilan tindakan, keterampilan komunikasi. *Ketiga*, sikap dan nilai-nilai prosedural. Dalam prakteknya setiap *pambakal* (Kepala Desa) di Desa Hamalau sudah melakukan proses kaderisasi terhadap kadernya walaupun proses kaderisasi itu dijalankan secara non formal. Akan tetapi proses kaderisasi ini hanya dijalankan oleh lingkungan keluarga tertentu saja, ditemukan beberapa faktor penyebabnya yaitu diantaranya petuah orang tua zaman dahulu yang cenderung melarang keturunannya menjadi Kepala Desa, kesibukan masyarakat, dan tidak adanya faktor pendorong masyarakat untuk berlomba-lomba memperebutkan kursi kepemimpinan Kepala Desa seperti halnya di desa-desa lainnya.

Kata Kunci: Kaderisasi, Kepemimpinan, Pembakal

1. Latar Belakang

Peran manusia dalam organisasi sangatlah penting karena manusia merupakan *key position* yang akan menentukan keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuan. Organisasi sebagai kumpulan tugas dan manusia pelaksanaannya harus berkualitas sehingga dapat mengemban visi dan misi dengan baik karena kemajuan organisasi ditentukan oleh pemimpinnya maka harus dipersiapkan secara matang melalui pengkaderan. Pengkaderan dapat dilakukan

sejak awal dan terus dibina agar pada saat memegang tampuk kepemimpinan tidak mengecewakan dan tidak merugikan organisasi. Pengkaderan dapat dilakukan dengan cara barat yang liberal atau cara jepang yang mengedepankan senioritas dan pengalaman. Indonesia sendiri pada saat ini masih mencari bentuk pengkaderan baik politik maupun bisnis.

Sebelum era reformasi bergulir kekuasaan Kepala Desa lebih cenderung terkesan absolut dan sentralistik, kontrol

masyarakat kepada jalannya pemerintahan tidak begitu terbuka hal ini disebabkan ruang untuk berdemokrasi yang tidak begitu terbuka sehingga kebanyakan Kepala Desa menjabat dengan jangka waktu yang lama dan tidak mengikuti peraturan-peraturan yang sudah digariskan baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Selain itu tanpa adanya pendidikan politik yang memadai dari masyarakat sehingga dalam pergantian Kepala Desanya pun tidak jauh dari lingkungan keluarga Kepala Desa yang terdahulu dimana Kepala Desa yang sudah mangkat akan digantikan oleh keturunannya sendiri. Sementara itu fungsi Kepala Desa itu sendiri sebagai penengah apabila terjadi pertikaian antara masyarakat desa sehingga membentuk kultur masyarakat yang masih beranggapan bahwa posisi Kepala Desa haruslah diduduki oleh seorang yang mempunyai pengaruh besar dan dituakan sehingga kediktatoran Kepala Desa akan semakin tumbuh berkembang dan akan semakin mengubur setiap pendapat dari masyarakatnya sendiri tentang jalanya pemerintahan.

Terlepas dari semua hal diatas pendidikan politik yang hampir tidak ada sehingga masyarakat tidak mengenal administrasi pemerintahan walaupun hanya lingkup kecil administrasi pemerintahan desa. Hal ini juga yang menyebabkan masyarakat enggan untuk menduduki posisi Kepala Desa dan menyerahkan segala urusan pemerintahan kepada orang yang sudah secara turun temurun mengurus masalah administrasi ini.

Di era reformasi, dimana daerah mempunyai kebebasan yang besar untuk menentukan pembangunan daerahnya termasuk pengangkatan pemimpinnya, terdapat kecendrungan primordialisme mulai digunakan untuk mendasari segala kebijakan yang ditempuh. Hal ini disebabkan pemahaman terhadap reformasi yang keliru, dilanggarnya rambu-rambu otonomi, dan salah satu penyebabnya adalah tidak dipersiapkannya secara matang kader yang akan memimpin dalam suatu wilayah. Pada

umumnya terutama pemimpin politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan pada era otonomi banyak menggunakan persaingan yang tidak jujur, *money politics* (Ismawan,1999) sehingga menghasilkan pemimpin yang tidak layak, tidak berkualitas untuk menjadi motivator dan dinamisator rakyat atau bawahannya.

Begitu pula halnya yang terjadi di tatanan pemerintahan Desa Hamalau, dalam proses pemilihan Kepala Desanya sangat kental dengan isu-isu tentang pemerintahan seperti misalnya isu tentang pergantian kepemimpinan Kepala Desa dimana Kepala Desa yang mangkat digantikan oleh calon pengganti dari kalangan tertentu saja. Antara satu Kepala Desa dan Kepala Desa sebelumnya terdapat hubungan kekerabatan, sehingga terdapat kesan bahwa jabatan Kepala Desa di Desa Hamalau hanya akan diduduki oleh orang dari kalangan itu-itu saja. Menurut hasil wawancara awal bersama salah satu tokoh masyarakat Desa Hamalau H. Majeri yang mengatakan bahwa Kepala Desa saat ini ada hubungan keluarga dengan Kepala Desa sebelumnya yaitu Kepala Desa Sakarani (2002-sekarang) yang menjabat saat ini adalah merupakan keponakan dari kepala Kepala Desa Ideris (1986-1991) atau yang lebih dikenal oleh Masyarakat Desa Hamalau sebagai "*Pambakal Idis*" begitu pula dengan Kepala Desa Yusri (1991-2001) atau yang lebih dikenal dengan gelar "*Pambakal Iyus*" juga memiliki hubungan keluarga dengan Kepala Desa Sakarani Walaupun bukan Keluarga dekat. Kemudian antara Kepala Desa Jarkasi (1981-1986) dan Kepala Desa sebelumnya yaitu Kepala Desa Rusli (1976-1981) merupakan saudara Sepupu. Dan yang lebih unik lagi Kepala Desa yang terpilih selalu berasal dari RT 3, Walaupun dalam perjalanan pemerintahannya tidak memberikan dampak yang buruk terhadap masyarakat dalam artian segala pelayanan terhadap masyarakat berjalan baik.

Sebelum Kepala Desa Bapak Sakarani ini menjabat sebagai Kepala Desa terjadi kekosongan pejabat Kepala Desa Di Desa

Hamalau, hal ini disebabkan masa jabatan Kepala Desa Yusri sudah habis dan sudah menjabat selama 2 periode dan tidak ada pengganti beliau yang siap untuk itu di angkatlah seorang pejabat sementara yaitu Bapak Jarkasi Sp yang menjabat selama 1 tahun. Kemudian setelah jabatan sementara Bapak Jarkasi Sp sudah habis dan mengingat latar belakang Bapak Sakarani yang saat itu adalah sebagai anggota BKD dianggap memiliki kemampuan untuk menjabat sebagai Kepala Desa, dan atas inisiatif para anggota BKD maka di anjurkanlah Bapak Sakarani untuk menjadi Kepala Desa di Desa Hamalau.

Untuk Kepala Desa yang menjabat saat ini yaitu Bapak Sakarani sudah menduduki jabatan sebagai Kepala Desa selama 2 periode, pada saat periode pertama hanya terdapat 1 calon Kepala Desa. Kemudian agar pemilihan Kepala Desa itu tidak dianggap menyalahi peraturan perundang undangan maka di sediakan satu buah kotak suara kosong sebagai saingan calon Kepala Desa tadi. Dari 1.504 penduduk yang mempunyai hak suara disediakan 25 suara yang dipilihkan untuk mengisi satu kotak suara kosong tersebut.

Kemudian saat periode ke 2 memang terdapat 2 calon kepala desa akan tetapi calon yang ke 2 hanyalah sebagai formalitas saja karena hasil dari pemilihan Kepala Desa di Desa Hamalau sudah dapat di tentukan sebelumnya. Keberadaan calon yang ke 2 yaitu Bapak Rusdi hanya sebagai calon banyangan untuk melengkapi persyaratan pemilihan Kepala Desa.

Hal ini berbanding jauh dengan Desa tetangga yaitu Desa Tibung Raya yang mana saat pemilihan Kepala Desanya selalu terdapat calon yang lebih dari satu calon yang memang bersaing untuk menjadi Kepala Desa, seperti halnya keterangan yang diperoleh dari masyarakat setempat yaitu Saparuddin dan Agus pada saat masa kampanye Kepala Desa Tibung raya Bapak Subli melakukan Kampanye secara *door to door* kerumah warga untuk mendapatkan masa serta menyediakan transfort kepada warga yang jauh untuk melakukan pemungutan suara untuk dapat

memenangkan persaingan dalam bursa pemilihan Kepala Desa dan hal ini tidak terjadi saat pemilihan Kepala Desa Hamalau dimana dengan mulus Bapak Sakarani menjadi Kepala Desa.

2. Perumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang perlu ditemukan jawabannya adalah : Bagaimana proses kaderisasi *Pambakal* (Kepala Desa) di Desa Hamalau Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

3. Tinjauan Pustaka

Pengkaderan adalah orang yang didik untuk menjadi pelanjut tongkat estafet suatu partai atau organisasi, calon tunas muda, generasi muda (Partanto dan Dahlan,1994:293). Pengkaderan juga diartikan sebagai proses perbuatan mendidik atau membentuk seseorang menjadi kader (Nawawi,1993:188). Sedangkan menurut Masdar Hekmi Kader diartikan sebagai para pendukung dan pelaksana cita cita yang cakap sedangkan menurut Henri Fayol pembentukan kader disebut juga sebagai pendidikan dan pengembangan tenaga-tenaga yang akan disertai tugas kepemimpinan dikemudian hari.

Arti pengkaderan bagi suatu organisasi adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan sistematis untuk mengaktualisasi dan mengembangkan potensi yang ada pada anggota. Pengkaderan dikatakan berhasil apabila calon kader berhasil disadarkan tentang apa dan bagaimana dirinya harus berbuat sesuai tujuan yang ingin dicapai. Sehingga yang disebut dengan strategi pengkaderan adalah cara jitu yang dilakukan oleh organisasi dalam melakukan serangkaian kegiatan yang berkaitan antara satu dengan lainnya yang ditunjukkan pada usaha proses pembentukan kader dalam upaya mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Sebagai upaya dalam membentuk kader aktivitas pengkaderan pada hakikatnya tidak berbeda dengan aktivitas pendidikan sebab pada dasarnya aktivitas pada

individu atau kelompok merupakan aktivitas pendidikan. Karena pengkaderan merupakan suatu pendidikan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi yang berorientasi untuk menyiapkan pemimpin dimasa depan.

Secara terminologi kaderisasi adalah proses pencetakan kader. Sedangkan definisi kader itu sendiri adalah orang yang dipercaya mampu melanjutkan dan melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam suatu organisasi. Dengan kata lain kaderisasi adalah proses, cara, atau perbuatan dalam usaha mendidik manusia-manusia yang memiliki kompetensi yang mapan untuk menjalankan amanah dalam suatu organisasi. Kaderisasi berfungsi untuk mempersiapkan orang-orang yang berkualitas yang nantinya dipersiapkan untuk melanjutkan perjuangan sebuah organisasi, tanpa kaderisasi rasanya sangat sulit dibayangkan sebuah organisasi dapat bergerak dan melakukan tugas-tugas keorganisasiannya dengan baik dan dinamis.

Kader pada mulanya adalah suatu istilah militer atau perjuangan yang berasal dari kata *carde* yang definisinya adalah pembinaan yang tetap sebuah pasukan inti (yang terpercaya) yang sewaktu waktu diperlukan. (Nanang Fatah, 2000:54)

Kader dalam *kamus ilmiah populer* adalah orang yang dididik untuk menjadi pelanjut tongkat estapet suatu partai atau organisasi: tunas muda (Pius Partanto, 1994:293) dan dalam *kamus induk istilah ilmiah seri intelektual* disebut bahwa kader adalah generasi penerus atau pewaris di masa depan dalam organisasi, pemerintahan atau partai politik. (Dahlan AlBarry, 2003:349)

Dalam kata lain kader adalah orang yang diharapkan akan memegang pekerjaan penting dalam organisasi. Dalam perjuangan agama Islam diperlukan kader inti, kader inti adalah kader yang setia pada cita-citanya dan tidak mau tergoda dunia apapun.

Kader diartikan sebagai orang yang diharapkan akan memegang jabatan atau pekerjaan penting dipemerintahan, partai dan lain-lain. Sedangkan pengkaderan adalah proses mempersiapkan seseorang untuk menjadi

penerus dimasa depan, yang akan memikul tanggung jawab penting dalam lingkungan organisasi.

Kader yang diharapkan dapat mengemban tongkat kepemimpinan pada masa yang akan datang menurut alfan (1980) hendaknya mempunyai kualifikasi sebagai berikut:

- a. Mempunyai kualitas kepemimpinan yang andal
- b. Pengabdian menjadi dasar dari bekerja, serta organisasi sebagai tempat mengabdikan demi tujuan yang lebih besar.
- c. Bukan semata-mata berorientasi kepada kekuasaan, tetapi lebih pada pengabdian untuk sesama dan kekuasaan hanya sebagai alat pengabdian.
- d. Seseorang yang mempunyai motif berprestasi tinggi (high need of achievement).
- e. Peka terhadap perubahan lingkungan terutama yang mempunyai pengaruh langsung terhadap dirinya maupun organisasi dimana ia bergabung.

Dari uraian diatas tentang kaderisasi akan memunculkan sebuah pertanyaan tentang mengapa proses kaderisasi ini diperlukan dalam sebuah organisasi. Karena semua manusia termasuk yang sekarang menjadi pemimpin, suatu saat pasti akan mengakhiri kepemimpinannya baik dikehendaki maupun tidak proses tersebut bisa saja terjadi karena beberapa hal, seperti, diantaranya (Veithzal Rivai, 2006:85):

- a. Dalam suatu organisasi ada ketentuan periode kepemimpinan seseorang.
- b. Adanya penolakan dari anggota kelompok, yang menghendaki pemimpinnya diganti baik secara wajar maupun tidak wajar.
- c. Proses alamiah, menjadi tua dan kehilangan kemampuan dalam memimpin.
- d. Kematian.

Kaderisasi merupakan salah satu hal yang paling penting dalam sebuah organisasi, mengingat kaderisasi adalah bagian yang sangat menentukan umur sebuah organisasi. Sebuah organisasi hanya akan mampu bertahan dari berbagai tantangan dan

perubahan zaman jika dapat melakukan regenerasi yang baik, maka mutlak diperlukan suatu proses kaderisasi yang teratur dan berjenjang. Hal ini sejalan dengan pendapat Rochajat Harun (2006:94) yang menyatakan bahwa:

Kaderisasi yang baik setidaknya memiliki beberapa jenjang yang diperuntukan bagi para kadernya. Klasifikasi jenjang kaderisasi menurut Rochhajat Harun adalah sebagai berikut:

- a. Jenjang pertama, biasanya diperuntukan bagi kader pemula.
- b. Jenjang kedua, biasanya diperuntukan bagi kader madya.
- c. Jenjang ketiga, biasanya diperuntukan bagi calon-calon politisi.

Kaderisasi merupakan salah satu bentuk pendidikan politik yang dijalankan oleh organisasi. Kaderisasi yang dijalankan oleh suatu organisasi biasanya dilakukan dengan menanamkan sejumlah informasi politik yang dilakukan dengan sengaja kepada orang-orang tertentu, dalam hal ini kader dari suatu organisasi tersebut. Informasi yang diberikan bisa berupa pengetahuan politik, tidak hanya terkait dengan sejarah, misi, visi, dan strategi partai politik, tetapi juga hal-hal yang terkait dengan permasalahan bangsa dan Negara. Dalam pola kaderisasi juga dapat dilakukan transfer keterampilan dan keahlian berpolitik.

Proses kaderisasi yang diwujudkan dalam bentuk pendidikan politik merupakan suatu pembinaan terhadap seseorang yang bertujuan agar seseorang itu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam system politik yang ideal yang hendak dibangun. Berikut adalah urgensi pendidikan politik menurut Idrus Affandi (Yani Suryani, 2009:28)

Pendidikan dengan indoktrinasi dipandang sudah kurang tepat, karena dalam banyak hal terbukti kurang member hasil sebagaimana diinginkan. sementara itu penyadaran politik lebih berorientasi pada tindakan-tindakan, yakni mempraktekan apa yang telah diketahui dan dipahami masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal ini menunjukkan bahwa proses pendidikan yang efektif tidak sekedar menambah pengetahuan. Tetapi sampai pada tingkat pengambilan keputusan tindakan.

Dari pendapat diatas, penulis berkesimpulan bahwa dengan pendidikan politik selain akan meningkatkan pemahaman serta pengetahuan seseorang mengenai politik juga akan meningkatkan ketrampilan seseorang dalam bertindak secara politik.

Pendidikan politik yang dilakukan dipahami sebagai suatu perbuatan yang dilakukn dengan sengaja dalam rangka memberikan pelatihan serta bimbingan untuk mengembangkan potensi diri yang dimiliki seseorang, yang meliputi aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Stradling (Yani Suryani, 2009:23) bahwa substansi pendidikan politik meliputi: *Pertama*, pengetahuan yang terdiri dari pengalaman professional dan pengetahuan praktikal. *Kedua*, keterampilan yang terdiri dari keterampilan intelektual, keterampilan tindakan, keterampilan komunikasi. *Ketiga*, sikap dan nilai-nilai prosedural.

Jadi, kaderisasi yang tercermin dalam pendidikan politiknya merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan dengan sengaja oleh suatu organisasi dalam rangka melakukan regenerasi dengan baik. Dalam pelaksanaannya proses kaderisasi terdiri dari dua macam yaitu:

Kaderisasi informal

Untuk melahirkan seorang kader yang berkualitas diperlukan proses dengan jangka waktu yang cukup lama. Seluruh masa kehidupan seseorang sejak masa kanak-kanak dan masa remaja merupakan masa kaderisasi untuk menjadi pemimpin dalam upaya membentuk pribadi agar memiliki keunggulan dalam aspek-aspek yang dibutuhkan untuk mampu bersaing.

Kaderisasi disebut juga proses pendidikan termasuk proses belajar di sekolah, peluang yang diberikan orang tua (pendidikan keluarga) peluang dalam kurikulum dan program ekstra kurikulum serta lingkungan.

Kepribadian positif harus dipupuk sejak dini dan seumur hidup. Dari proses tersebut seseorang dapat mengurangi, mengubah, menghilangkan aspek-aspek negative. Usaha mengembangkan kepribadian positif itu tergantung kepada orang tua karena disekolah terfokus pada kurikulum, waktu belajar dan pengajar terbatas dan hal ini hanya berorientasi pada intelektual.

Kaderisasi informal terdapat beberapa indikator atau kriteria kelebihan, yaitu:

1. Berkepribadian positif
2. Gigih
3. Mempunyai loyalitas
4. Mempunyai dedikasi terhadap organisasi
5. Memiliki sifat dan sikap pasrah kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai penentu yang mutlak.

Kaderisasi formal

Perkataan formal menunjukkan bahwa usaha mempersiapkan seseorang calon kader dilakukan secara berencana, teratur dan tertib, sistematis, terarah dan disengaja usaha itu bahkan dapat diselenggarakan secara melembaga, sehingga semakin jelas sifat formalnya. Pengkaderan formal merupakan usaha kaderisasi yang dilakukan oleh suatu organisasi atau lembaga dalam bentuk pendidikan yang dilaksanakan secara terprogram, terpadu dan bertujuan untuk mencapai cita-cita yang diharapkan. Untuk itu proses kaderisasi mengikuti suatu kurikulum yang harus dilaksanakan selama jangka waktu tertentu dan berisi bahan-bahan lain sebagai pendukungnya.

Kaderisasi tersebut diatas memiliki nilai positif karena mempunyai daya dorong bagi peningkatan prestasi melalui kompetensi atau persaingan sehat seperti jujur dan sportif. Sebaliknya juga akan berfungsi sebagai motivasi untuk menumbuhkan dan mengembangkan kerja sama karena untuk berprestasi tidak mungkin diwujudkan lagi.

Usaha kaderisasi internal yang bersifat formal dapat ditempuh dengan beberapa cara sebagai berikut:

- 1) Memberi kesempatan menduduki jabatan pemimpin pembantu

- 2) Latihan kepemimpinan di dalam atau diluar organisasi
- 3) Untuk memberikan kesempatan kepada anggota organisasi untuk mengikuti program mempersiapkan calon pemimpin yang diselenggarakan dalam jangka waktu tertentu.
- 4) Memberikan tugas belajar.
- 5) Untuk mempersiapkan calon pemimpin yang berkualitas dalam suatu organisasi perlu dilakukan kegiatan kaderisasi

Faktor pertama yang harus diperhatikan dalam organisasi adalah manusia, ia merupakan asset termahal dan terpenting. Manusia ibarat urat nadi kehidupan dari sebuah organisasi ditentukan oleh faktor manusia yang mendukung.

Sumberdaya manusia (*human resources*) dapat diklasifikasikan menjadi dua aspek, yaitu kuantitas dan kualitas. Kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia (Populasi penduduk yang sangat kontribusinya. Sedangkan aspek kualitas menyangkut mutu dari sumber daya manusia yang berkaitan dengan kemampuan fisik maupun kemampuan nonfisik (kecerdasan non mental) yang menyangkut kemampuan bekerja, berfikir, dan keterampilan-keterampilan lainnya. (Veithzal Rivai, 2009:90)

Kaderisasi mempunyai beberapa aspek pembinaan, adapun asas-asas pembinaan kaderisasi tersebut adalah sebagai berikut:

- Sistematis konseptual
Sistematis konseptual yaitu pelatihan formal yang diperoleh oleh suatu organisasi yang tujuannya untuk mengembangkan pengetahuan bagi para kader sehingga para kader memiliki konsep yang jelas dalam berfikir.
- Asas istiqomah
Asas istiqomah (*continue*) yaitu pembinaan yang terus menerus bagi para kader yang akan menjadi penerus dan pengembang organisasi.
- Asas intensif
Asas intensif yaitu pembinaan yang sungguh sungguh kepada para kader karena para kader

merupakan infestasi pemimpin masa depan dan penerus perjuangan organisasi.

- Asas koordinatif

Asas koordinatif yaitu pembinaan kepada para kader dengan melakuakn pertemuan secara langsung yaitu dengan car mengumpulkan pada suatu tempat yang sudah ditentukan.

4. Metode Penelitian

Peneliti bermaksud untuk menggarap penelitian ini dengan dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dan memakai metode deskriptif untuk menggali dan mengungkap akar permasalahan terhadap berbagai fenomena yang terjadi serta fakta dan data yang diselidiki secara mendalam. Hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Penelitian yang digarap dengan menggunakan metode penelitian kualitatif memiliki beberapa ciri, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Suripan S. Hutomo dalam Bugin (2001) yang menjelaskan bahwa ciri-ciri penelitian yang menggunakan metode kualitatif adalah sebagai berikut:

- Sumber data bersifat ilmiah, artinya peneliti harus berusaha memahami fenomena social secara langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat,
- Peneliti sendiri merupakan intrumen penelitian yang paling penting dalam pengumpulan data dan penginterpretasian data,
- Penelitian kualitatif bersifat diskriptif, artinya mencatat secara teliti segala gejala(fenomena) yang dilihat dan didengar serta dibacanya (via wawancara atau bukan, catatan lapangan, foto, video tape, dukomen pribadi catatan atau memo, dokumen resmi atau bukan dan lainnya), dan peneliti juga harus berupaya membandingkan, mengabstrakan dan menarik kesimpulan.
- Penelitian harus digunakan untuk memahami bentuk bentuk tertentu atau studi kasus,

- Analisis bersifat induktif,
- Dilapangan peneliti harus berperilaku seperti masyarakat yang diteliti,
- Dat informan harus berasal dari tangan pertama,
- Kebenaran data harus dicek dengan data lain, misalnya Dokumen, Wawancara, observasi mendalam,dan lain-lain (data lisan dicek dengan data tulis),
- Orang (sesuatu) yang dijadikan subjek penelitian tersebut partsipan (buku dapat dianggap sebagai partisipan) dan konsultan serta teman juga dapat dijadikan partisipan,
- Titik berat perhatian harus pada emik, artinya peneliti harus menaruh perhatian pada masalah penting yang diteliti dari orang orang yang diteliti dan bukan dari etik(dari kaca maa peneliti),
- Dalam pengmpulan data menggunakan puspositive sampliang, bukan probabilistic statistik,
- Dapat menggunakan data kualitatif maupun kuantitatif.

Dari penjelasan diatas mengenai ciri-ciri penelitian kualitatif, sehingga peneliti berpendapat untuk mengungkap dan menganalisa fenomena serta fakta secara mendalam tentang bagaimana jalannya proses kaderisasi kepemimpinan pambakal (kepala Desa) di Desa Hamalau sangat cocok dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif pada umumnya cocok di gunakan untuk mengungkap situasi sosial yang pada umumnya memiliki permasalahan yang belum jelas , holistic, kompleks dan penuh makna yang tidak mungkin data didapatkan dengan menggunakan metode kuantitatif melalui intrumens seperti kuesioner(wahyu,2009:69).

Melalui pendekatan ini peneliti berharap dapat menemukan berbagai hal yang sifatnya masih terpendam karena penelitian kualitatif memerlukan kajian yang mendalam dengan latar belakang yang wajar serta mempunyai latar belakang ilmiah atau konteks dari suatu kebutuhan (*entity*) sebagai sumber data langsung dan diharapkan mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

5. Hasil Penelitian

Di era reformasi, dimana daerah mempunyai kebebasan yang besar untuk menentukan pembangunan daerahnya termasuk pengangkatan pemimpinnya, terdapat kecendrungan primordialisme mulai digunakan untuk mendasari segala kebijakan yang ditempuh. Hal ini disebabkan pemahaman terhadap reformasi yang keliru, dilanggarnya rambu-rambu otonomi, dan salah satu penyebabnya adalah tidak dipersiapkannya secara matang kader yang akan memimpin dalam suatu wilayah. Pada umumnya terutama pemimpin politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan pada era otonomi banyak menggunakan persaingan yang tidak jujur, *money politics* (Ismawan,1999) sehingga menghasilkan pemimpin yang tidak layak, tidak berkualitas untuk menjadi motivator dan dinamisator rakyat atau bawahannya.

Begitu pula halnya yang terjadi di tatanan pemerintahan Desa Hamalau, dalam proses pemilihan Kepala Desanya sangat kental dengan isu-isu tentang pemerintahan seperti misalnya isu tentang pergantian kepemimpinan Kepala Desa dimana Kepala Desa yang mangkat digantikan oleh calon pengganti dari kalangan tertentu saja. Antara satu Kepala Desa dan Kepala Desa sebelumnya terdapat hubungan kekerabatan, sehingga terdapat kesan bahwa jabatan Kepala Desa di Desa Hamalau hanya akan diduduki oleh orang dari kalangan itu-itu saja. Menurut hasil wawancara awal bersama salah satu tokoh masyarakat Desa Hamalau H. Majeri yang mengatakan bahwa Kepala Desa saat ini ada hubungan keluarga dengan Kepala Desa sebelumnya yaitu Kepala Desa Sakarani (2002-sekarang) yang menjabat saat ini adalah merupakan keponakan dari kepala Kepala Desa Ideris (1986-1991) atau yang lebih dikenal oleh Masyarakat Desa Hamalau sebagai "*Pambakal Idis*" begitu pula dengan Kepala Desa Yusri (1991-2001) atau yang lebih dikenal dengan gelar "*Pambakal Iyus*" juga memiliki hubungan keluarga dengan

Kepala Desa Sakarani Walaupun bukan Keluarga dekat. Kemudian antara Kepala Desa Jarkasi (1981-1986) dan Kepala Desa sebelumnya yaitu Kepala Desa Rusli (1976-1981) merupakan saudara Sepupu. Dan yang lebih unik lagi Kepala Desa yang terpilih selalu berasal dari RT 3, Walaupun dalam perjalanan pemerintahannya tidak memberikan dampak yang buruk terhadap masyarakat dalam artian segala pelayanan terhadap masyarakat berjalan baik.

Sebelum Kepala Desa Bapak Sakarani ini menjabat sebagai Kepala Desa terjadi kekosongan pejabat Kepala Desa Di Desa Hamalau, hal ini disebabkan masa jabatan Kepala Desa Yusri sudah habis dan sudah menjabat selama 2 periode dan tidak ada pengganti beliau yang siap untuk itu di angkatlah seorang pejabat sementara yaitu Bapak Jarkasi Sp yang menjabat selama 1 tahun. Kemudian setelah jabatan sementara Bapak Jarkasi Sp sudah habis dan mengingat latar belakang Bapak Sakarani yang saat itu adalah sebagai anggota BKD dianggap memiliki kemampuan untuk menjabat sebagai Kepala Desa, dan atas inisiatif para anggota BKD maka di anjurkanlah Bapak Sakarani untuk menjadi Kepala Desa di Desa Hamalau.

Untuk Kepala Desa yang menjabat saat ini yaitu Bapak Sakarani sudah menduduki jabatan sebagai Kepala Desa selama 2 periode, pada saat periode pertama hanya terdapat 1 calon Kepala Desa. Kemudian agar pemilihan Kepala Desa itu tidak dianggap menyalahi peraturan perundang undangan maka di sediakan satu buah kotak suara kosong sebagai saingan calon Kepala Desa tadi. Dari 1.504 penduduk yang mempunyai hak suara disediakan 25 suara yang dipilhkan untuk mengisi satu kotak suara kosong tersebut.

Kemudian saat periode ke 2 memang terdapat 2 calon kepala desa akan tetapi calon yang ke 2 hanyalah sebagai formalitas saja karena hasil dari pemilihan Kepala Desa di Desa Hamalau sudah dapat di tentukan sebelumnya. Keberadaaan calon yang ke 2 yaitu Bapak Rusdi hanya sebagai calon

banyangan untuk melengkapi persyaratan pemilihan Kepala Desa.

Hal ini berbanding jauh dengan Desa tetanga yaitu Desa Tibung Raya yang mana saat pemilihan Kepala Desanya selalu terdapat calon yang lebih dari satu calon yang memang bersaing untuk menjadi Kepala Desa, seperti halnya keterangan yang diperoleh dari masyarakat setempat yaitu Saparuddin dan Agus pada saat masa kampanye Kepala Desa Tibung raya Bapak Subli melakukan Kampanye secara *door to door* kerumah warga untuk mendapatkan masa serta menyediakan transfort kepada warga yang jauh untuk melakukan pemungutan suara untuk dapat memenangkan persaingan dalam bursa pemilihan Kepala Desa dan hal ini tidak terjadi saat pemilihan Kepala Desa Hamalau dimana dengan mulus Bapak Sakarani menjadi Kepala Desa.

Memang seluruh informan tidak menyatakan secara pasti bahwa Kepala Desa Saat ini adalah kader dari Kepala Desa sebelumnya, namun dari beberapa informan menyatakan bahwa memang Kepala Desa saat ini adalah merupakan hasil didikan dari Kepala Desa sebelumnya. Seperti pernyataan dari saudara baihaqi seorang mantan Ketua Karang Taruna di Desa Hamalau yang menyatakan bahwa dari masa kemasa Kepala Desa di Desa Hamalau selalu terpengaruh oleh Kepala Desa sebelumnya. Karena Kepala Desa yang menjabat selalu berasal dari lingkungan keluarga itu saja, sehingga pendidikan politik dan gaya kepemimpinan diturunkan dari kepala desa sebelumnya. Hal ini dikarenakan kedekatan kekeluargaan sehingga secara tidak sengaja Kepala Desa yang menjabat akan memberikan pendidikan politik dan pengetahuan tentang kepemimpinan Kepala Desa walaupun cara pendidikannya tidak melalui cara pendidikan yang formal. Kepala Desa yang menjabat akan memilih anggota dalam organisasinya dari orang-orang yang dia kenal dengan baik termasuk dari lingkungan keluarganya sendiri. Jadi secara tidak langsung mereka akan mendapatkan pengalaman secara praktikal

tentang keorganisasian dan kepemimpinan di Desa. Hal ini juga yang mendorong kader dari Kepala Desa yang menjabat untuk menggantikan pendahulunya menduduki jabatan sebagai kepala desa. Sedangkan dari masyarakat sendiri sudah percaya dan menyerahkan secara sukarela pergantian kepemimpinan dari lingkungan keluarga itu saja.

Masih menurut saudara baihaqi dapat dikatakan bahwa proses kaderisasi oleh Kepala Desa di Desa Hamalau hanya terjadi di lingkungan keluarga Gardu Saja, hal ini juga yang menjadi penyebab kelangkaan calon Kepala Desa di setiap ada pagelaran pemilihan Kepala Desa di desa Hamalau. Walaupun tidak secara langsung seorang Kepala Desa yang menjabat memperkenalkan Kader yang dipersiapkannya akan tetapi dari kebijakan Kepala Desa memasukan kadernya kedalam organisasi- organisasi yang ada di desa menjadikan Kader yang dibina menjadi aktif dalam setiap kegiatan di Desa, sehingga secara tidak sadar masyarakat akan mengenal sosok Kader yang dibina dan dipersiapkan untuk menggantikannya sebagai Kepala Desa.

Hal ini juga sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Agus Ramadhani seorang anggota BPD yang mengatakan Bahwa secara tidak langsung Kepala Desa akan memperkenalkan Kader yang dibinanya melalui cara dengan mengaktifkan Kader dalam keorganisasian di Desa. Contohnya Kepala Desa yang menjabat saat ini yaitu bapak Sakaharani merupakan seorang anggota BPD pada saat masa kepemimpinan Kepala Desa yang terdahulu yaitu Bapak Jarkasi Sp dan Bapak Yusri, walaupun saat itu Bapak Jarkasi Sp merupakan pejabat sementara saja sebagai Kepala Desa Hamalau. Pada saat menjadi anggota BPD Bapak Sakharani selalu dituntut aktif dalam setiap kegiatan di Desa dan Kepala Desa Yusri pun sering kali mendorong dan mengarahkan Bapak sakharani untuk selalu mengikuti kegiatan di Desa. Lambat laun masyarakat mengenal sosok sakharani sebagai seorang yang sudah tangkas dan handal dalam pemerintahan dan

masyarakat mempercayai beliau mampu menduduki jabatan sebagai kepala Desa, sehingga saat tiba masa pemilihan Kepala Desa secara mudah Bapak sakharani dipilih sebagai Kepala Desa di Desa Hamalau karena sosok beliau yang sudah dikenal sebagai sosok yang aktif dalam kegiatan di Desa hamalau.

Bapak Sakharani yang menjabat sebagai Kepala Desa saat ini diperkenalkan kepada dunia kepemimpinan Kepala Desa oleh Kepala Desa terdahulu yaitu Bapak Yusri. Walaupun tidak pernah mendapatkan pendidikan secara formal tentang Kepemimpinan Kepala Desa, namun bapak Sakharani banyak mendapatkan pelajaran langsung secara praktek dari pengalamannya duduk sebagai anggota BKD di Desa hamalau pada saat periode Kepemimpinan dua Kepala Desa sebelumnya. Secara pribadi sosok sakharani sebagai Kepala Desa terbentuk berkat arahan Kepala Desa pendahulunya yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam pemecahan masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat Desa Hamalau. Walaupun kepala Desa Yusri sudah mangkat dari jabatannya namun beliau masih saja berpengaruh dalam kepemimpinan sebagai Kepala Desa, bahkan muncul istilah bahwa beliau diberi gelar sebagai "*pambakal tuba*" artinya masyarakat masih sangat menaruh rasa hormat kepada beliau dan setiap pendapat beliau masih dipandang oleh masyarakat dan juga sakharani sebagai Kepala Desa dalam mengambil keputusan. Sehingga hasil didikan beliau kepada sakharani sangatlah kental terlihat. Begitu pula dalam hal pengetahuan politik, pelajaran tentang politik sangat banyak didapatkan oleh sakharani dari pambakal terdahulu. Sakharani banyak mendapatkan petunjuk bagaimana seharusnya bersikap dihadapan masyarakat dan juga bagaimana mengambil sikap terhadap masalah yang timbul dilingkungan masyarakat.

Uraian dibawah ini merupakan hasil wawancara penulis bersama seorang tokoh masyarakat di Desa Hamalau. Informan bernama H. Majeri umur beliau sekitar kurang

lebih 60 tahun, beliau adalah seorang pensiunan Kepala Sekolah SDN Hamalau 1. Menurut penjelasan yang didapat dari beliau tentang kaderisasi kepemimpinan Kepala Desa di Desa Hamalau, beliau menjelaskan bahwa dari generasi ke generasi setiap pergantian Kepala Desa Hamalau selalu bekatat pada lingkup keluarga itu-itu saja. Kepala desa yang mangkat akan digantikan oleh orang dilingkungan keluarga itu saja. Dari fakta yang sudah beliau jelaskan maka timbul suatu pertanyaan besar, kenapa calon Kepala Desa Hamalau hanya berasal dari kalangan tertentu? Apakah tidak ada orang dari kalangan keluarga lain yang berminat untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa?

Menurut analisa beliau ada beberapa hal yang menyebabkan tidak adanya gairah dari kalangan keluarga lain untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa yang pertama, adanya *tutudub* (anjuran) dari orang-orang terdahulu untuk menghidari sebagai Kepala Desa alasannya adalah pada zaman dahulu masyarakat desa di lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini kultur budayanya agak keras, hal ini juga tidak berlainan untuk masyarakat di Desa Hamalau. Hal-hal yang tidak dapat dibicarakan secara kekeluargaan akan diselesaikan dengan cara kekerasan dan tidak ada usaha mencari jalan damai melalui cara yang lebih baik lagi selain dengan cara kekerasan. Akhirnya setiap pertikaian yang terjadi mau tidak mau haruslah ditangani oleh Kepala Desa sebagai *tutuba* (Pemimpin) di Kalangan masyarakat sebagai penengah pada setiap pertikaian yang terjadi di masyarakat. Bahkan sering kali Kepala Desa terlibat sebagai korban dalam pertikaian tersebut. Sehingga hal ini menyebabkan posisi sebagai Kepala Desa haruslah diduduki oleh orang yang terpendang dan memiliki pengaruh besar di masyarakat. Hal ini juga menjadikan Kepala Desa adalah sebagai jabatan yang diduduki oleh seorang jawara Kampung, dan tentu saja dalam perebutannya akan ada anggapan bahwa dalam menduduki Jabatan sebagai Kepala Desa haruslah *Bajajaguanan* sehingga kebanyakan dari orang tua zaman dahulu

melarang anak dan keturunannya untuk menjadi Kepala Desa sedangkan kalangan keluarga yang sudah menjadi Kepala Desa akan selalu berusaha untuk menjadikannya sebagai Kepala Desa hal ini disebabkan gengsi yang tinggi sebagai Jawara kampung. Mereka beranggapan bahwa keturunannya haruslah memiliki pamor yang sama seperti dirinya, dan sebagai pembuktian haruslah menjadikan keturunannya sebagai Kepala Desa untuk menciptakan anggapan dimasyarakat bahwa keluarganya adalah merupakan kalangan terpendang di Desa.

Yang kedua, memang kultur budaya masyarakat desa Hamalau khususnya dan desa-desa lain di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah tidak seperti dulu lagi, anggapan Kepala Desa adalah orang yang paling berani di Desa sudah mulai menghilang. Sekarang anggapan di masyarakat bahwa orang yang menduduki jabatan sebagai Kepala Desa adalah orang yang paling pandai berurusan secara administratif. Namun demikian karena sudah menduduki jabatan sebagai Kepala Desa secara turun temurun sehingga menjadikan ini sebagai proses pembelajaran bagi keturunannya dalam berurusan secara administratif, sedangkan kalangan keluarga lain tidak memiliki kesempatan ini. Sehingga seolah olah keturunan dari seorang Kepala Desa adalah orang yang sudah siap dan pandai dalam berurusan secara administratif. Hal ini juga yang menjadi pertimbangan dikalangan masyarakat untuk tetap mempercayakan dan menyerahkan jabatan Kepala Desa kepada orang-orang dilingkungan Kepala Desa yang terdahulu. Dan tidak ada usaha dari kalangan keluarga lain untuk menduduki jabatan sebagai kepala Desa.

Dari penjelasan hasil wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan hal hal yang menjadi faktor penyebab Kaderisasi kepemimpinan Kepala Desa Hamalau hanya Berkisar pada kalangan Keluarga itu saja. Yang menjadi titik beratnya adalah pendidikan dan proses kaderisasi yang dilakukan oleh Kepala Desa yang sebelumnya hanya kepada kalangan keluaranya saja, walaupun proses kaderisasi ini

hanya dilakukan secara non formal akan tetapi ini memberikan dampak yang sangat besar pada kader karena saingan dari kader ini tidak memiliki pendidikan sebagai Kepala Desa. Hal ini juga yang menyebabkan masyarakat Desa Hamalau akan menyerahkan secara sukarela dan akan mempercayakan sepenuhnya jabatan Kepala Desa kepada orang-orang dikalangan keluarga Kepala Desa yang sebelumnya. Akhirnya orang yang menjadi kandidat Kepala Desa tidak akan beragam, karena tidak adanya saingan dari pihak lain. Sehingga dalam proses pemilihannya akan hanya menjadi formalitas dan munculah calon-calon banyangan sebagai pelengkap persyaratan pemilihan Kepala desa di Desa Hamalau ini.

Berikut adalah hasil wawancara bersama seorang warga bernama M. Akhyar Ridwan, beliau adalah seorang pegawai BUMN yang berumur sekitar 38 tahun.

Setelah ditanya tentang proses kaderisasi Kepemimpinan Kepala Desa beliau memaparkan bahwa proses kaderisasi kepemimpinan di Desa Hamalau ini hanya akan jalan di lingkungan keluarga tertentu saja, alasannya adalah pertama masyarakat kebanyakan enggan untuk mengambil resiko sebagai kepala desa. Pandangan beliau mengenai Kepala desa ini hanyalah sebagai tempat mengadu masyarakat, contohnya saat terjadi perkelahian di kalangan warga maka akan di serahkan kepada Kepala Desa dan tidak jarang Kepala Desa mendapat peluru nyasar dari perkelahian tersebut, kemudian saat terjadi pencurian juga akan menjadi tugas Kepala Desa Untuk mengatur warga agar tergerak untuk melakukan Ronda. Seorang yang menjadi Kepala Desa haruslah diduduki oleh orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi karena tidak jarang tugas sebagai Kepala Desa akan melanggar hak-hak pribadinya sendiri. Karena mungkin saja permasalahan terjadi tidak hanya di siang hari atau hanya pada saat Kepala Desa sedang bertugas saja akan tetapi Kepala Desa haruslah siap siaga 24 jam untuk menangani permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat yang dipimpinnya.

Kemudian ada pandangan lain mengenai Kepala Desa bahwa Kepala Desa juga akan beralih fungsi sebagai maklar tanah, artinya setiap transaksi tanah Kepala Desa akan mendapatkan *Fee* dari penjual. Oleh beberapa kalangan masyarakat hal ini dianggap hal yang kurang pantas dilakukan sehingga beberapa masyarakat akan enggan untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa.

Selain itu kecendrungan masyarakat yang mudah mencari kerja sehingga kadang-kadang mereka juga tidak tertarik untuk menjabat sebagai Kepala Desa, mereka lebih cenderung enggan untuk direpotkan mengurus masalah-masalah yang terjadi dimasyarakat.

6. Kesimpulan

Dari uraian yang sudah dikemukakan pada ditarik beberapa Kesimpulan tentang Proses kaderisasi Kepemimpinan *Pamabakal* (Kepala Desa) di Desa Hamalau adalah sebagai berikut: Proses kaderisasi Kepemimpinan *Pamabakal* (Kepala Desa) di Desa Hamalau sudah berjalan walaupun proses kaderisasi dilakukan secara Informal, pores kaderisasi ini dilakukan oleh Kepala Desa terhadap kadernya dengan cara mengikut sertakan kadernya dalam keorganisasian di Desa. Namun demikian Kepala Desa terdahulu tidak melakukan pendidikan dan pelatihan secara formal kepada kadernya.

Dalam mempersiapkan kadernya Kepala Desa terdahulu telah melakukan pendidikan politik kepada kadernya yaitu dengan indikasi sebagai berikut: Memberikan pengetahuan yang terdiri dari pengalaman profesional dan pengetahuan praktikal terhadap kadernya dengan cara mengikut sertakan kadernya dalam keorganisasian di Desa. Mengembangkan keterampilan yang terdiri dari keterampilan intelektual, keterampilan tindakan, keterampilan komunikasi terhadap kadernya. Menanamkan sikap dan nilai-nilai prosedural terhadap kadernya. Ada beberapa Faktor yang menyebabkan Proses kaderisasi Kepemimpinan *Pamabakal* (Kepala Desa) di Desa Hamalau hanya berkuat pada

lingkungan keluarga gardu saja yaitu sebagai berikut:

- a. Sikap apatis masyarakat Desa Hamalau yang didorong dari petuah orang tua zaman dahulu yang cenderung melarang keturunannya untuk menjadi Kepala Desa.
- b. Kesibukan yang lumayan padat karena kultur masyarakat Desa Hamalau tergolong masyarakat perkotaan.

Daftar Pustaka

- Al-Barry, M. Dahlan, L. Lya Sofyan Yacob, 2003. *Kamus Induk Istilah Ilmiah; Seri Intelektual*, Target Press, Surabaya.
- Alfian. 1980. *Pemikiran dan perubahan Politik Indonesia (Kumpulan Karangan)*. Jakarta, PT. Garamedia.
- Ardiwilaga, Anwar, 1997. *Usaha Tani Dalam Perspektif Masa Depan*, Raneka, Jakarta.
- Bugin, Burhan, 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Baradat, L.P. 1991. *Political Ideologies: Their Origins and Impact*. New Jersey. Prentice Hall.
- Fattah, Nanang, 2000. *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosada Karya.
- Hact, M.J. 1997. *Organization Theory; Modern, Symbolic and Postmodern Perspective*. Kuala Lumpur, Oxford University Press.
- Hadari, Nawawi, 1993. *Kepemimpinan Menurut Islam*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ismawan, Indra. 1999. *Money Politics Pengaruh Uang dalam Pemilu*, Yogyakarta, Media Pressindo.

- Moleong, Lexy J., 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nasution, 1988. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Partanto, Pius A, M.Dahlan Al-Barry, 1994. *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola. Surabaya.
- Sagir, Soeharsono. 1984. *Kesempatan Kerja Ketahanan Nasional dan Pembangunan Manusia Sentubnya*. Bandung, Nova.
- Rivai, Veithzal, 2006. *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: PT. Raja Perkasa Garfindo Persada.
- Profil Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
Kandangan: Bapeda
- Profil Desa/ Kelurahan se Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kandangan : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan.